

DPRA Susun Daftar Isian Masalah Revisi UUPA, Termasuk Pasal tentang Lembaga Wali Nanggroe

Category: Aceh

written by Maulya | 22/05/2023



[Orinews.id](https://orinews.id) | Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Mawardi mengatakan pihaknya telah menyusun Daftar Isian Masalah (DIM) mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di antaranya adalah Pasal 1 ayat 17 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Menurutnya, gagasan menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai koordinator lembaga-lembaga khusus dan istimewa Aceh dilandasi beberapa alasan. Salah satunya karena selama ini lembaga

tersebut terkesan berjalan sendiri.

“Kami menilai wali nanggroe itu sejajar dengan pemerintah, diatas atau dibawah pemerintah. Posisi Wali Nanggroe adalah bukan lembaga politik, bukan juga lembaga pemerintah, dan itu tegas dalam undang-undang disampaikan,” kata Pria yang akrab disapa Tgk Adek itu saat diwawancarai media, Senin (22/5/2023).

Politisi Partai Aceh ini mengatakan, dalam materi revisi Pasal 1 ayat 17 tersebut berubah menjadi, Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang merepresentasikan kehidupan kebudayaan adat dan istiadat rakyat Aceh.

“Tugas Wali Nanggroe lebih kepada pengambil kebijakan terhadap pembangunan Aceh dalam semua sektor. Misalnya kita membuat konsep pendidikan Aceh, ekonomi Aceh, maka Wali Nanggroe duduk memanggil semua lembaga untuk merumuskannya,” ujar Tgk Adek.

Sebab itu, lanjutnya, dalam Qanun Wali Nanggroe, DPRA mencanangkan Wali Nanggroe adalah sebagai Ketua Forum yang bisa mengkoordinir semua lembaga Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) khusus dan istimewa di Aceh.

“Dan selama ini kita melihat tokoh-tokoh besar yang melakukan kunjungan ke Aceh pasti mereka berkunjung ke Wali Nanggroe. Artinya mereka menganggap Wali Nanggroe sebagai orang tua di Aceh, yang punya pengaruh besar,” tutup Ketua Banleg DPRA itu.

Dengan revisi Pasal 1 ayat 17 ini, DPRA berharap agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berperan lebih efektif dan terintegritas dalam pembangunan Aceh.

Tgk Adek juga menegaskan bahwa DPRA terus berupaya memperkuat kewenangan Aceh dalam revisi UUPA untuk kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

|Reporter: Wanda

|Editor: Maulya